

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku:

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2010. *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Helmi. 2013. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jimmy Jones Sembiring. 2009. *Legal Officer*. Visi Media. Jakarta Selatan.
- Juniarso. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- M. Tohar. 2000. *Membuka Usaha Kecil*. Kanisius. Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- S.P. Siagian. 1990. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung. Jakarta.
- _____. 1994. *Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Pemerintahan*. UI Press. Jakarta.
- Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta
- Victor M. Situmorang. 1999. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Y. Sri Pudyatmoko 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Grasindo. Jakarta.
- Yusnani Hasyimzoem, dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perizinan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.

Peraturan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang.

Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Padang.

C. Sumber-sumber lain/Website :

Ade Heryana, Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif diakses dari <https://www.researchgate.net/profile/Adeheryana2/publication/32935-51816/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf> diakses pada tanggal 27 Agustus 2020, pukul 21.06 WIB.

Informasi Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang diakses dari <https://ppid.padang.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020, pukul 16.00 WIB.

Pemerintah Hilangkan Izin Gangguan, Izin Tempat Usaha dan Izin Prinsip UKM diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e909e2201c/pemerintah-hilangkan-izin-gangguan--izin-tempat-usaha-dan-izin-prinsip-ukm/>, diakses tanggal 27 Agustus 2020, pukul 20.30 WIB.

Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Online Single Submission (OSS) diakses dari <https://driv.google.com/file/d/1PwnZULrMaD3Hr6rv-dPSrx7yigM3eteg4/view>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB.

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diakses dari <https://oss.go.id/portal/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020, pukul 17.18 WIB.

Statistik Daerah Kota Padang Tahun 2015 diakses dari http://padangkota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kota-Padang2015.pdf, diakses pada tanggal 11 Maret 2020, pukul 11.30 WIB.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perizinan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.

Peraturan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang.

Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Padang.

